

KEMAUAN POLITIK UNTUK KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK KEMAJUAN BANGSA

Abdul Kadir

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Kemajuan bangsa dalam naungan NKRI didasarkan pada penegakan konsep empat pilar bangsa ini. Keempat pilar bangsa tersebut menuntut adanya kemauan politik untuk kemajuan pendidikan dan perlu pula adanya pendidikan politik untuk mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa melalui pendidikan politik harapannya akan mengarahkan kemajuan bangsa. Artikel ini disusun untuk dapat mengurai salah satu gagasan untuk kemajuan bangsa dari dua sisi, yaitu pendidikan dan politik. Berdasarkan hasil yang berhasil penulis telusuri maka : 1) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan belum konsisten dengan aksi politik. Kepentingan politik (partai politik) lebih dominan dari keberpihakannya kepada kepentingan kemajuan bangsa melalui usaha pendidikan yang maju dan berkualitas. Keberlanjutan kekuasaan (*power sustainbalility*) dan berbagai kekuasaan (*power sharing*) lebih menjadi target praktisi politik di Indonesia. Semestinya, sistem politik di Indonesia mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa agar maju dan merdeka, menjadi tuan rumah sendiri dibawa panji-panji UUD 1945 dan nilai inti Pancasila dengan menjunjung tinggi usaha pendidikan yang modern dan berkualitas; 2) Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah semestinya menjadi “sin qua non” dan prioritas nomor satu dalam ranking seleksi proses dan produk kebijakan politik pemerintah dan Negara Indonesia. Karena, bukti sejarah dunia dan amanat pendiri bangsa sudah cukup jelas dan kuat untuk ditauladani dan diwujudkan dalam pembangunan bangsa di masa depan; 3) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan dan pendidikan politik untuk kemajuan bangsa harus diawali dengan penempatan orang (pejabat) yang tepat orang dan tepat tempat, baik di jajaran eksekutif maupun dewan legislative. Ingat kata nabi “suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancuranya”. Implikasinya, ahlik politik dan ahli pendidikan adadalah syarat mutlak untuk menduduki jabatan politik dan terutama jabatan pendidikan (Mendiknas, Eselon I dan II). Kemudian, takalah pentingnya, dukungan APBN dan APBD minimal 20% yang dikelolah dalam satu atap untuk biaya pendidikan nasional; 4) Dalam konteks pasar bebas dan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, maka konsep dan model “knowledge networking industry” atau industrialisasi pendidikan mesti dikedepankan dalam perancangan sistem pendidikan nasional dengan tetap berasaskan pancasila dan UUD 1945 sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia yang maju

diantara bangsa-bangsa beradab dan berbudaya di dunia modern sekarang dan masa depan.

Kata Kunci : Kemajuan Politik, Pendidikan Politik, Kemajuan Pendidikan, Keemajuan Bangsa

A. PENDAHULUAN

Politik dan pendidikan merupakan urusan penting dan vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya saling berkait dan menentukan sehingga lahir sebutan sistem politik dan sistem pendidikan. Oleh karenanya, semua komponen bangsa perlu memberi perhatian serius dengan komitmen yang kuat untuk mendudukkan persoalan politik dan pendidikan itu secara proporsional. Sebab, keduanya menyangkut hajat orang banyak dan menentukan masa depan bangsa. Kestabilan politik misalnya dapat mengancam keberlangsung proses pendidikan yang bermutu. Kegagalan pendidikan bangsa dapat pula mengancam kestabilan politik bangsa. Jadi, kedua hal ini saling menentukan maju mundurnya suatu bangsa.

Membahas persoalan politik dan pendidikan keduanya tak terpisahkan walau dapat dibedakan. Keduanya terpaut pada suatu muara yaitu “ sumber daya manusia”. Manusia yang berpolitik (*homo politicon*) karena manusia adalah makhluk sosial (*homo social*) sehingga lahir suku bangsa yang memiliki tanah air dan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam suatu wadah yang disebut Negara, diikat oleh suatu aturan dasar yang menjamin hak dasar dan kewajiban bagi setiap warga Negara secara adil dan bijaksana. Pendiri bangsa Indonesia (founding fathers) menyatakan Indonesia merdeka dan merumuskan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. (Pembukaan UUD 1945 Alinea I dan IV).

Belajar dari Negara maju dan bercermin pada Negara sedang berkembang atau terkebelakang dalam segala aspek kehidupan (IPOLEKSOSBUDAGHANKAM) ditandai dengan sistem pemerintahan yang demokratis berbanding otokratis dan kesejahteraan rakyat berbanding kesengsaraan rakyat, kestabilan politik berbanding kekacauan politik, keamanan Negara berbanding peperangan antar suku dan antar bangsa; semua itu berpulang kepada kualitas dan kematangan bangsa itu sendiri. Kemajuan suatu bangsa dan Negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Di sinilah

peranan strategis lembaga pendidikan dalam proses pendewasaan dan pematangan masyarakat suatu bangsa, menjadi manusia yang modern (*homo sapiens*), yang beradab (*civilization*), merdeka (*independent*), berbudaya (*cultural*), dalam wujud masyarakat madani (*civil society*).

Sejalan dengan tema makalah ini, kelompok IV bermaksud mengulas persoalan politik dan pendidikan dengan membatasi diri pada pengertian dan filosofi politik dan pendidikan, peranan berkait dalam pembuatan kebijakan, sosialisasi dan pembudayaan politik, dan implikasinya terhadap kemajuan bangsa. Pembahasan dibagi pada dua bagian besar dan setiap bagian disusun dalam beberapa sub pokok bahasan sebagaimana disajikan berikut ini.

B. Kemauan Politik Untuk Memajukan Pendidikan

1. Pengertian politik

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “1 (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan..., 2 segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap Negara lain..., 3 cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan;...”(Dekdiknas, 2001: 886). Dari beberapa pengertian ini, maka pengertian kedua “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain untuk memajukan urusan pendidikan adalah makna yang tepat untuk membahas pengertian politik dalam makalah ini.

Aristoteles dan Plato, filosof Yunani Kuno, memandang politik sebuah cabang etika. Alasan moral adalah alasan praktis, mengarah kepada keputusan bijak dalam persoalan bergantung (*contingent matters*). Plato dan Aristoteles walaupun berbeda dalam berbagai hal akhirnya sepakat pada kesimpulan: *human beings are naturally political; the polis is the highest form of human community; the highest political goal is the just man in the just polis; the polis cannot exceed a certain limited size without losing its character; the wise should rule; and education, the dialectic method of reasoning, and contemplation constitute the paths to wisdom*. Kata Aristoteles, orang baik hanya bisa menjadi warga Negara yang baik dalam kota (polis) yang baik. (Encyclopedia Americana, 1998: 346).

Kebijakan politik mesti diambil oleh public atau persetujuan rakyat banyak atau perwakilan. Karl Deutch menegaskan bahwa politik itu adalah *the making of decision by public means, in contrast to the making of personal decisions privately by individual and the*

making of economic decisions in response to in such impersonal forces as money, market conditions, and resource scarcities (Encyclopedi Americana, 1998: 349). Dalam hal ini, pemerintahan merupakan seperangkat lembaga untuk membuat keputusan politik dan seperangkat pejabat yang keputusannya merupakan kebijakan public dalam suatu Negara atau sistem politik besar lainnya.

Keputusan politik begitu penting dan mewarnai kehidupan bangsa dan Negara, menggiring kemana bangsa dan Negara ini akan dibawa, maka sistem politik menjadi keharusan adanya dalam sebuah Negara merdeka. Patut dikemukakan di sini pendapat Gabriel Almond (dalam Frey, 1960: 351) bahwa sistem politik adalah “sistem interaksi yang ditemukan dalam seluruh masyarakat independen. Sistem politik adalah suatu sistem yang legitimate, sistem yang memelihara ketertiban (*order-maintaining*) atau sistem yang mentransformasi (*transforming system*) dalam suatu masyarakat. Frey juga mengutip pendapat David Easton (1965) yang membatasi sistem politik sebagai ‘sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan’. Secara lebih rinci, Robert Dahl (dalam Frey, 1960) membatasi sistem politik sebagai “... Suatu pola yang tetap tentang hubungan manusia (*human relationship*) yang melibatkan kekuasaan (*power*), aturan (*rule*), atau otoritas (*authority*) yang luas signifikan.

Jadi, sistem politik pada hakikatnya adalah suatu pola interaksi yang tetap, legitimate, yang mengikat dan bersifat otoritatif, yang melibatkan kekuasaan, aturan yang luas dan signifikan. Implikasinya adalah setiap bangsa dan Negara yang merdeka harus menata dan memantapkan sistem politiknya agar pemerintahan Negara berjalan lancar dan kesatuan dan persatuan bangsa menjadi kuat dan terhindar dari disintegrasi bangsa. Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang beragam budaya, suku, ras, dan golongan serta agama dengan rentang wilayah dan penyebaran penduduk yang luas dan tidak merata dalam arti kuantitas dan kualitas jelas sangat memerlukan sistem politik yang baik dan dinamis sehingga selogan “Bhineka Tunggal Ika” dapat dipertahakan sepanjang masa.

Secara ideology, sistem politik Indonesia adalah presidensial, tetapi dalam prakteknya ternyata juga sistem parlementer. Dengan kata lain, bahwa sistem perpolitikan di Indonesia adalah sistem campuran (*mixing system*) yaitu sistem presidensial dan parlementer. Model sistem ini merupakan menurut hemat kami mempunyai sisi positif dan negative. Adapun sisi positif adalah kontrol public atau rakyat melalui perwakilannya (DPR) akan langsung melekat terhadap

perilaku pemerintahan, tetapi sisi negatifnya dapat menimbulkan titik-titik rawan dan kemadegan roda pemerintahan yang dapat berujung pada kekacauan sosial politik. Sebagai solusinya, menurut hemat kami adalah perlu dibangun kesepakatan dan komotmen bersama terhadap *the rule of the game* dan atau “kompromi politik” dengan mendahulukan kepentingan umum, bangsa dan Negara melebihi di atas segalanya.

2. Perkembangan sistem politik di Indonesia

Perkembangan sistem politik dan pendidikan Indonesia tampak seiring dan seirama, suatu perkembangan yang mandeg dan tidak signifikan. Kelihatannya kedua sistem ini mempunyai hubungan yang saling menghambat dan mengganggu perkembangannya. Sejak bangsa Indonesia tahun 1945 hingga saat ini, perkembangan sistem politik dan pendidikan nasional cenderung semakin memburuk, bangsa ini hamper kehilangan harga dirinya, krisis indentitas. ; dan ketertinggalan dalam segala hal (*curtural lag*). Mengapa ini terjadi? Jawabannya adalah bahwa perkembangan sistem politik dan pendidikan di Indonesia belum saling mendukung (*mutual relationship*) dan saling memperkuat (*synergism*). Anehnya, sistem politik yang stagnan itu tetap saja menjadi lokomotif pembangunan dan sistem pendidikan tetap menjadi salah satu gerbong dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

Mari dilihat lembaran sejarah Indonesia merdeka selama lebih dari setengah abad (1945-1998) yang diwarnai oleh berbagai perubahan, baik dalam format Negara maupun dalam format bernegara. Hal ini terlihat dari adanya perubahan dalam sistem konstitusi, pemerintahan ekonomi, dan politik serta paradigm yang melandasinya, yang membawa dampak tertentu terhadap sistem dan proses penyelenggaraan Negara, khususnya dalam hubungan pemerintah dan masyarakat. Secara kronologis, dapat disajikan perkembangan sistem pemerintahan sebagai berikut:

- a) Kurun waktu 1945-1949 berlaku UUD 1945, dimana perkembangan politik, ekonomi dan pemerintahan menjurus kepada sistem demokrasi liberal dengan multi partai dan berkembangnya Kabinet Parlementer di samnping Kabinet Presidensial yang secara keseluruhan dalam waktu 5 tahun mencapai jumlah 9 kabinet. Lembaran sejarah pada periode ini ditandai dengan peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia tidak memiliki peluang yang cukup untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan Negara yang dicita-citakan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Perjuangan

untuk mempertahankan kemerdekaan baru berakhir setelah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 19 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), dan menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia pada 27 Desember 1949.

- b) Kurun waktu 1950-1959, berlaku UUDS 1950 yang sempat merubah bangsa Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), namun 17 Agustus 1950 kembali menjadi Negara kesatuan. Selama periode ini, penyelenggaraan Negara bertumpuh kepada sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi liberal dengan sistem multi partai, dan cabinet parlementer yang secara keseluruhan mencapai 10 kabinet. Lembaran sejarah pemerintahan pada periode ini ditandai dengan silih bergantinya cabinet yang menunjukkan tidak adanya stabilitas politik dan kepemimpinan yang kuat, serta lemahnya komitmen kenegarawan pemimpin partai. Namun, pada periode ini telah dapat diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya, tepatnya 29 September 1955. Sayangnya, hasil pemilu tidak menghasilkan sebuah kehidupan demokratis yang lestari. Sebab, kemacetan dan konstituante hasil pemilu telah mengundang tindakan diktatorial berupa dekrit presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, yang menetapkan pembubaran konstituante hasil pemilu, dan kembali berlakunya UUD 1945. Sejak itu hingga kini, UUD 1945 menjadi hokum dasar bagi Negara kesatuan Republik Indonesia.
- c) Kurun waktu 1959-1966, penyelenggara Negara bertumpuh pada sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan yang serba dipimpin (demokrasi dipimpin) yang dalam prakteknya menjadi serba etatisme (serba Negara), dan yang memimpin adalah Soekarno dan Soekarnoisme dengan kroni-kroninya yang kemudian dikenal dengan rezim orde lama (orla) atau orde nasakom. Dengan dekritnya (1959), Bung Karno (Soekarno) menjadi sumber daya hokum dan kedaulatan, yang berkewenangan mengangkat pejabat-pejabat Negara, baik dilembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif; yang kemudian seluruhnya berstatus menteri sehingga lembaga pemerintahan Negara secara keseluruhan menjelma menjadi mesin birokrasi politik yang mengabaikan prinsip ekonomi dan pemerintahan yang efisien dan demokratis, serta bernafaskan ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Pidato soekarno yang penting menjadi haluan Negara, menjadi dasar kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pada kurun waktu ini pula dibentuk 6 kabinet presidensial, yang merupakan koalisi multi partai yang terdiri dari unsur-unsur yang

berbasiskan kutural nasakom. Dengan format Negara berbasisi nasakom itu lah berkembang dalam realitas suatu proses historis dialektis, yang membawa Indonesia dalam situasi konflik internal dan berakhir dengan Kudeta Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) serta kehancuran politik, ekonomi, dan sosial. kegalan paradigma dan sistem nasakom telah mengundang bangkitnya angkatan 66, memperjuangkan arah baru kebijakan bidang ekonomi, politik, dan pemerintahan untuk menegakkan Tritura dan Hanura, yang antara lain diformulasikan dalam Ketetapan MPRS No. XXII Tahun 1966, sebagai landasan perjuangan bangsa dalam kurun waktu 1966-1968 untuk mengadakan stabilitasi, rehabilitasi, dan reformasi kelembagaan sebagai persiapan pembangunan nasional secara berencana dan berkelanjutan.

- d) Kurun waktu 1966-1998, adalah masa berkembangnya orde baru (Orba) dengan sistem penyelenggaraan Negara berdasarkan kepemimpinan nasional berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Pada masa pemerintahan Orba ini, terlihat beberapa perubahan kelembagaan dan kinerja pemerintahan antara lain: (1) menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal, dasar monoloyalitas dalam bernegara dengan format dan mekanisme P4 dalam kebudayaan Pancasila; (2) tampilnya birokrasi lebih sebagai sosok penguasa dibandingkan sebagai pelayan masyarakat dan meluasnya personil ABRI dalam birokrasi sipil (Kekaryaan); (3) kuatnya intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu sehingga menimbulkan kesangsian bahkan penolakan selama itu pemilu berlangsung secara luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur dan adil); (4) terselenggaranya sidang-sidang umum MPR dan kegiatan DPR hasil pemilu secara regular, namun masih menunjukkan kelemahan dalam mengemban perannya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat dalam melakukan pengawasan, penilaian pertanggung jawaban pemerintah, dan pembuatan kebijakan secara proaktif; dan (5) penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan yang bertumpuh pada sistem anggaran dan sistem pengambilan keputusan yang bersifat elitis dan sentralistis.
- e) Dalam kurun waktu 1999-2004, muncul gerakan reformasi yang berhasil melengserkan kepemimpinan Orba dibawah presiden soeharto. Namun, sistem penyelenggaraan Negara tetap berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 tanpa doktrinasi P4. Pada periode ini terjadi pengalihan

kepemimpinan nasional sebanyak dua kali, dimana pada tahun 2001 presiden terpilih (oleh MPR) diberhentikan oleh MPR yang sama karena presiden Gusdur mengeluarkan dekret untuk membubarkan MPR dan DPR; justru MPR mengganti presiden dengan mengangkat Megawati Soekarno menjadi presiden dan memilih dan mensyahkan Hamza Haz sebagai wakil presiden. Kemudian, sesuai dengan amandemen UUD 1945, maka pada tahun 2004 pemilihan pemimpin nasional (presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD serta DPRD) dilakukan secara langsung yang penyelenggaraannya diorganisir oleh Komite Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah. Disamping perubahan mendasar dalam pemilihan pemimpin nasional juga terjadi perubahan fundamental sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 2000).

- f) Kurun waktu 2004-2009, perubahan yang demokratis dengan pemilihan dan wakil secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dilakukan dengan dua tahap: (1) terdapat 5 calon Presiden/Wakil dan hasilnya kemenangan 2 pasang kandidat Presiden/Wakil. Selanjutnya pemilihan kembali untuk pasangan yang cocok hingga terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan M Jusuf Kalla sebagai Wakil presiden RI periode 2005-2009. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan M Jusuf Kalla sebagai wakil presiden RI periode 2005-2009 dilakukan pemilihan langsung calon legislatif dari 36 dan atau 44 partai.

3. Pengaruh sistem politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia

Sejak Orde lama hingga Orde baru (1945-1998), sistem politik yang identik dengan sistem pemerintahan adalah bersifat sentralistik. Artinya, pola interaksi pemerintahan, otoritas, aturan, dan kekuasaan bermuara ke pusat. Semuanya ditentukan dan menjadi kewenangan pusat, sementara pemerintahan daerah lebih bersifat pelaksana, perpanjangan tangan pusat daerah dalam jalur birokrasi yang panjang. Begitu juga halnya dengan sistem pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara sentralistik. Pengaruh sistem politik terhadap sistem pendidikan bukan saja dalam rekayasa bentuk structural, procedural, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) bagaikan kitab suci dari pusat (Jakarta), tetapi juga muatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan pada pendidikan formal dan non formal dengan memasukkan pesan dan misi pemerintah yang

berkuasa seperti PSPB, Kewiraan, PPKn, dan P4; dan aksi-kasih normalisasi kehidupan kampus (NKK), membebaskan mahasiswa terlibat langsung dalam politik praktis, menggalakkan kegiatan resimen mahasiswa (berbau militeristik, sistem komando, patuh komandan), dan orientasi mahasiswa baru sesuai dengan keinginan pejabat pusat.

Sistem pendidikan memang bersifat terbuka sehingga pengaruh sistem politik suatu Negara akan sangat terasa, apalagi sistem pendidikan dianggap sangat strategis untuk membentuk dan mengarahkan sikap politik tertentu demi kelestarian kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa. Sistem politik bagi sistem pendidikan akan menjadi salah satu masukan lingkungan (*environmental inputs*) yang sangat dominan dari masukan lainnya (IPOLEKSOSBUDAGHANKAM). Frey melukiskan pola interaksi kompleks sistem pendidikan dengan komponen-komponen yang ada di luar sistem, sehingga sistem pendidikan menjadi rumit, mencakup komponen kewarganegaraan, kemiliteran, keadilan, birokrasi, para pemimpin politik yang dipilih, partai-partai politik, asosiasi suka relawan, organisasi bisnis, organisasi buruh, dan organisasi keagamaan. Sistem politik dan pendidikan Indonesia yang sangat sentralistik telah mengakibatkan suatu kesenjangan dan ketidakrelevan serta kemandangan peleyanan politik, sehingga akumulasi kekecewaan masyarakat berakhir dengan menutup lembaran Orde Baru dan membuka lembaran reformasi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan pemerintahan yang sangat sentralistik kepada sistem yang sangat desentralistik. Perubahan tersebut memberi harapan akan ada perbaikan dalam pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataan sistem pendidikan nasional belum juga menunjukkan tanda-tanda perubahan kearah yang lebih baik. Faktor waktu, kesiapan manusia dan infra-struktur yang belum memadai dianggap sebagai penyebab merosotnya pelayanan publik. Oleh karenanya, ketiga faktor itu mesti dibenahi secara terencana dan sistematis. Bukan dengan mencabut kembali UU Otonomi Daerah sebagaimana dimunculkan oleh sebagian orang yang berkepentingan. Seiring dengan perjalanan waktu, perlu dirancang dan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem pendidikan di daerah otonomi dengan memberdayakan potensi daerah (SDA dan non SDA) secara optimal. Untuk jelasnya dapat digambar di bawah ini.

4. Peranan politik terhadap kebijakan pendidikan

Pendidikan dan sistem pendidikan mesti dipandang sebagai isu-isu politik utama dalam masyarakat. Banyak konflik politik yang mengacaukan partai, pemerintah, kelompok kepentingan, dan aktor-

aktor lain yang mengaduk-aduk kebijakan pendidikan. Sistem politik di Indonesia belum member tempat yang layak untuk lahirnya sebuah sistem pendidikan yang baik. Perjuangan yang bertele-tele dan berliku-liku di badan legislatif, ujung-ujungnya duit (uud) atau Bank_saku. Perilaku eksekutif yang suka gonta-ganti kebijakan pendidikan juga demi proyek baru. Sampai kapan dan bagaimana menyadarkan pelaku politik bangsa ini agar mengedepankan urusan pendidikan nasional sebagai urusan kemanusiaan dan kebangsaan di Indonesia?

Langkah awal yang mesti dilakukan adalah: (1) merubah atau menyamakan pandangan tentang peranan pendidikan bagi kemajuan bangsa, (2) pendidikan dipandang sebagai *human investment* jangka panjang, bukan sebagai beban pembangunan jangka panjang, (3) pendidikan dijadikan sebagai panglima pembangunan nasional, (4) kembalikan sistem pendidikan kepada ahlinya atau alamnya dan bebaskan dari kepentingan politik praktis sesaat, dan (5) junjung tinggi hak asasi manusia setinggi-tingginya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, bermertabat, berbudaya, sejahtera lahir batin. Dengan demikian, peranan politik atau kemauan politik mesti dimainkan oleh actor-aktor politik untuk memajukan bangsa dengan membuat kebijakan public yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu, efisien, merata, dan relevan dengan kehidupan masyarakat yang dinamis dan modern di masa depan.

5. Menuju politik pendidikan baru di Indonesia

Politik pendidikan adalah “suatu proses interaksi antara pelaku yang menghasilkan suatu kebijakan” (Soedijarto, 2004). Kebijakan pendidikan di Indonesia semestinya pencerdasan dan pencerahan kehidupan bangsa. Kesan umum selama ini adalah bahwa kebijakan pemerintah Negara belum berpihak kepada usaha memajukan pendidikan nasional. Menurut Soedijarto, bahwa sampai sekarang kita kita masih jauh dari berhasil dalam tugas untuk mewujudkan suatu tata kehidupan Negara bangsa Indonesia yang merdeka, modern, demokratis, berkeadilan sosial, berke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan menjunjung tinggi HAM. Bahwa hal ini terjadi tidak lain karena pendidikan yang kita selenggarakan belum bermakna sebagai proses transformasi budaya menuju mantapnya kehidupan Negara bangsa Indonesia (Soedijarto, 2004: 6).

Pencerdasan dan pencerahan kehidupan bangsa “hanya melalui pendidikan nasional yang bermutu, yaitu yang memungkinkan sekolah menjadi pusat penbudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap, yang diperlukan bagi peserta didik untuk menjadi warga Negara yang

bermoral, ber-Etos kerja, disiplin, produktif, demokratis dan bertanggung jawab – seperti yang diperankan oleh sekolah-sekolah di Amerika Serikat, Inggris, dan Negara kebangsaan lainnya dalam proses menjadinya bangsa-bangsa tersebut--, fungsi konstitusional sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan (Soedijarto, 2004).

Kelemahan bangsa selama ini adalah *power bargaining* untuk kepentingan sosial budaya dalam proses penentuan kebijakan strategis pembangunan bangsa tidak terlalu kuat, masih kalah oleh *power bargaining* untuk kepentingan politik dan ekonomi serta pertahanan Negara (angkatan bersenjata). Kenyataan lain, posisi strategis dalam struktur pemerintahan belum diduduki oleh orang-orang yang profesional dan berkepemimpinan kuat dalam bidang pendidikan. Sementara, Persatuan dan gerakan organisasi kependidikan belum kompak dan masih dipandang sebelah mata oleh pengambil kebijakan strategis. Oleh karena itu, menurut hemat kami perlu langkah strategis menuju politik pendidikan baru di Indonesia dengan memperkuat *power bargaining*, memperbanyak jumlah anggota dewan perwakilan rakyat di pusat dan daerah, dewan perwakilan daerah (DPD); dan memberdayakan organisasi profesi serta *stake-holders* pendidikan untuk memperjuangkan kepentingan pendidikan bangsa dalam berbagai bentuk kebijakan strategis, termasuk merumuskan dan melahirkan undang-undang dan peraturan yang mengikat semua orang untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional, masyarakat madani (*civil society*) yang bermartabat, berbudaya, dan berdaya saing tinggi di arena percaturan dunia yang beradap. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bangsa terhadap pembangunan sector pendidikan, dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dan pertama pembangunan nasional, sebagai “human-investment” jangka panjang yang akan member *multiplier effect* bagi kemajuan bangsa dimasa depan, bukan dipandang sebagai beban pembangunan yang bersifat konsumstip. Penekanan pada pendidikan jalur sekolah ke depan perlu diberikan karena kenyataan peran sekolah yang sangat dominant dari dulu, kini, dan masa depan dalam proses pembudayaan dan peradaban bangsa Indonesia oleh karna itu, sekolah sebagai pusat pembudayaan dan peradaban bangsa perlu diwujudkan dengan mengerahkan segala sumber daya dan merealisasikan anggaran dan pendapatan pendidikan nasional minimal 20% dalam APBN dan APBD. Ini semua adalah indikator kemauan politik untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

C. Pendidikan Untuk Kemajuan Bangsa

1. Pengertian dan tujuan pendidikan

Pendidikan bisa mencakup seluruh proses pembelajaran (*all learning processes*) atau hanya terbatas pada proses pengajaran dan pelatihan (*teaching or training processes*). Tetapi, sekarang pendidikan dipahami sebagai proses belajar-mengajar (*teaching-learning processes*). Frey (1960: 380)., membatasi pendidikan sebagai proses dan hasil pengajaran (*education as the process and results of teaching*). Pengajaran dapat berlangsung di banyak tempat (*setting*), di sekolah, keluarga, di kelompok teman sebaya, tempat pekerjaan, tempat ibadah, dan di organisasi sukarela. Pengajaran bisa secara langsung tanpa perantara, bisa juga melalui rantai agen-agen yang berintervensi.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 membatasi pengertian pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara (pasal 1). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3).

Menurut Hanson dan Brembeck (1966; 37), pendidikan tidak mempunyai maksud utama memperbesar produksi barang (*goods*) dan jasa (*services*). Maksud pendidikan adalah untuk memperluas pemahaman (*understanding*), supaya orang-orang mungkin menggunakan potensi dasar mereka secara penuh, baik potensi spiritual, intelektual, ataupun fisik. Oleh sebab itu, pendidikan tetap bernilai sekali pun kontribusinya nihil bagi pengembangan ekonomi. Pendidikan telah didaftarkan salah satu di antara hak asasi manusia yang universal; itu perlu untuk pengembangan kepribadian manusia secara penuh, dan didasarkan atas rasa hormat kepada hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Di Negara yang baru merdeka adalah penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, didampingi oleh pengembangan keterampilan dan pengetahuan politik (*political skills and knowledges*), demokrasi dan cita-cita kemanusiaan

yang akan memungkinkan orang untuk terjamin, tidak hanya distribusi secara adil dari barang hasil ekonomi tetapi juga ketersediaan secara luas keuntungan sosial dan kemanusiaan.

2. Peranan pendidikan dalam pembentukan budaya politik

Budaya politik, merut Almond dan Verbal (1965) merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari setiap warga Negara terhadap sistem politik dan anekaragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga Negara dalam sistem tersebut. Adapun sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik dapat di ukur dalam tiga komponen, yaitu: (1) komponen kognitif, yaitu tingkat pengetahuan seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elite birokrasi, dan kebijakan yang di ambil dan symbol-simbol yang dimiliki sitem politik; (2) komponen efektif, yaitu berbicara aspek perasaan seseorang warga Negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik tersebut; dan (3) komponen evaluative, yaitu orientasi warga Negara yang ditentukan oleh evelusi moral yang memang telah dimilikinya.

Berangkat dari ketiga komponen ukuran budaya politik masyarakat seperti di atas, dan mengamati perilaku politik massa dan elite di Indonesia, misalnya dalam kasus pemilu baru-baru ini, maka menurut hemat kami telah terjadi ketidakkongruenan perilaku politik antara elitik politik dan massa politik. Sebenarnya, buday politik seseorang atau masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya, hal ini dapat dipahami mengingat, semakin tinggi kesempatan atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat untuk membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan relitas politik. Dengan demikian, kunci budaya politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikannya. Pendidikan politik, khusus pendidikan *civic* dalam pendidikan memepunyai penekanan pada rasa kedudukan sebagai Negara merdeka bagi semua orang. (Hanson dan Brembeck; .38). Ini adalah esensi dari Negara yang demokratis.

3. Pendidikan sebagai wadah sosialisasi politik Indonesia

Sosialisasi politik adalah suatu proes melalui mana anggota masyarakat, organisasi atau kelompok diajar sikap politik tertentu, perilaku politik tertentu (Frey, 1960; p. 380). Kemudian, Frey mengemukakan bahwa sosialisasi politik masuk kepada “political culture” dan the durable but different political orientations” (Frey,

1960; p. 380). Jadi, pada hakekatnya, sosialisasi politik adalah pendidikan politik, yakni suatu proses pendidikan yang sedara terarah dan terencana ditujukan untuk membantu peserta didik mencapai kematangan politik.

Urgensi pendidikan politik terasa kental disaat kesadaran warga Negara akan hak dan kewajiban dituntut pada waktu pilihan politik mesti diberikan secara umum. Sebagai Negara yang sedang berkembang, maka pendidikan politik menjadi syarat mutlak untuk membawa bangsa ini ke masyarakat maju (*civil society*) setara dengan Negara maju seperti Negara Amerika, Eropa, dan sebagian di Asia Timur. Soedijarto mengemukakan bahwa Amerika merupakan satu dari tidak banyak Negara yang mengharuskan pengajaran sejarah dan konstitusi negaranya disemua jenjang pendidikan. Dengan demikian, seiring dengan perjalanan waktu yang relative panjang mereka mampu membangun sistem perpolitikan yang sangat demokratis mantap, yang para pakar ilmu sosial mengkategorikan sebagai Negara yang sudah mencapai *civic culture*.

Sekolah merupakan agen sosialisasi yang sangat penting dimana pun dia ditemukan. Sekolah secara eksplisit dan terutama bermaksud untuk melaksanakan fungsi sosialisasi. Sosialisasi politik melalui sekolah formal itu sendiri adalah "raison d'être". Di AS, suatu pemahaman tentang politik sebagai konflik atau kompromis dan lembaga partai politik dan kelompok berkepentingan diajarkan dan dipelajari di sekolah. (Frey, 1960 : 391).

Pertanyaan: pengajaran politik macam apa yang cocok dan tidak cocok dilakukan di sekolah? Kami berpendapat bahwa pengajaran politik yang cocok untuk bangsa dan Negara Indonesia mencakup: (1) pendidikan kewarganegaraan dengan arah dan tujuan untuk pedewasaan peserta dalam perpolitikan Indonesia yang menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik; (2) penanaman ideology Negara dengan arah dan tujuan agar peserta didik memiliki dan menghayati nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar; dan (3) sejarah perkembangan politik bangsa, dengan arah dan tujuan agar peserta didik menyadari tahapan kematangan politik bangsanya sudah sampai dimana, memahami dan melaksanakan kewajiban politiknya, memperoleh dan mempertahankan hak politik, mengenal sistem pemerintahan, mengetahui struktur dan proses politik bangsa dan Negara dengan baik.

4. Pendidikan demokrasi dan kontribusinya terhadap rekrutmen politik

James Coleman merangkum banyak komentar banyak ilmuwan politik tentang teori stratifikasi kontemporer sebagai berikut: (1) bahwa perubahan kehidupan individu untuk mencapai status elit politik banyak terangkat, jika dia memiliki kepada, atau bisa naik ke dalam, tingkat lebih tinggi dari sistem stratifikasi; (2) bahwa dalam pendidikan masyarakat modern yang berorientasi prestasi cenderung menjadi *master* penentu dari mobilitas sosial karena ia sendiri mengarah kepada prestasi pekerjaan yang lebih tinggi dan secara konsekuensi kepada pendapatan yang lebih tinggi status sosial lebih tinggi, dan posisi prestasi lebih tinggi; dan (3) bahwa sebab itu, pendidikan adalah suatu kunci pokok, kalau bukan jiwa terhadap mobilitas politik ke dalam status elit. (Dalam Frey, 1960).

Pendidikan demokrasi jelas akan memberi kontribusi terhadap rekrutmen politik Indonesia dimasa depan. Karena, demokrasi dalam arti ideologi merupakan pangkuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan keberbedaan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Justru demokrasi itu ada karena adanya pengakuan terhadap pluralisme, terhadap pendapat yang berbeda, dan kesanggupan menyelesaikan konflik untuk tujuan bersama. Demokrasi adalah suatu pola hidup bersama dan akumulasi pengalaman-pengalaman yang terkomunikasikan bersama. Demokrasi ini dilandasi oleh kondisi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia agar diperlakukan dengan adil dan sama, dan kebutuhan untuk dilahirkan sebagai manusia bebas serta kebutuhan-kebutuhan lain yang dipercaya sebagai ciri manusia yang kodrati. Namun, kebutuhan-kebutuhan akan hal-hal yang hakiki ini perlu ditumbuh-kembangkan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Apabila kebutuhan akan penghargaan terhadap manusia yang hakiki ini tidak ditumbuh-kembangkan, demokrasi dalam diri manusia akan menjadi tumpul dan tidak mustahil akan mati.

Badan dunia, UNESCO menyatakan bahwa Negara demokrasi ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Anggota suatu masyarakat menghormati hukum dan tatanan. Artinya, dengan demokrasi menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Antara orang-orang yang di serahi untuk memimpin dan yang dipimpin harus ada saling percaya dan saling menghormati.
- b) Kebebasan yang disertai tanggung jawab; dalam kebebasan mengemukakan pendapat dan pengakuan akan hak-hak warga lain dan hak pribadi pihak lain

- c) Persamaan dengan keyakinan akan martabat manusia serta pangakuan akan hak-hak orang lain, khususnya kelompok minoritas dan yang tertindas.
- d) Disiplin diri sendiri yang diwujudkan dalam tata karma berinteraksi antar sesama, dan apabila ada konflik, penyelesaiannya diambil tanpa menggunakan kekerasan.
- e) Menjadi warga Negara yang aktif dan bertanggung jawab meliputi kesiapan untuk menjadi sukarelawan, dan berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang sadar akan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.
- f) Keterbukaan akan kebenaran ilmiah dan kebenaran universal, dan kesediaan untuk berdialog, berkonsultasi serta berorganisasi.
- g) Berpikir kritis dalam mencapai kebenaran yaitu menggunakan pikiran yang kritis dan jernih, dan melakukan keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan sahi, bukan atas prasangka.
- h) Solidaritas menggaris bawahi kerja sama yang baik dalam tim, pengambilan keputusan bersama serta mencapai penyelesaian masalah dengan damai.

5. Implikasi pendidikan terhadap kemajuan bangsa

Bangsa yang maju dapat dilihat dari kemajuan pendidikannya. Begitu juga sebaliknya bangsa yang terbelakang dapat dilihat dari keterbelakangan pendidikannya. Oleh karena itu, tiada pilihan lain yang dapat diambil kecuali harus memajukan pendidikan jika kita ingin memajukan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Langkah strategis untuk itu harus segera diambil, diantaranya yang sangat krusial adalah langkah-langkah politik untuk menghasil kebijakan strategis bagi kemajuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan dan sistem politik harus koheren kongkruen, tidak boleh berlawanan arah dan berbeda sasaran, karena kedua sistem ini saling mempengaruhi (hubungan interaktif). Kita tidak akan bicara mana yang mesti didahulukan dan dikemudiankan bagaikan telur dan ayam, atau mana yang lebih penting di antaranya, tetapi kita bangun keduanya secara harmonis, selaras dan proporsial, kalau bisa professional.

Dalam konteks yang lebih luas, di era globalisasi dan pasar bebas yang sudah berlangsung sekarang ini, perancangan sistem politik dan pendidikan mesti dilihat dalam konteks yang luas juga. Karena, ukuran kemajuan suatu bangsa bukan lagi terbatas dalam lingkup nasional atau regional apalagi local, sebab, batas wilayah dan Negara di dunia ini sangat transparan dan tak jelas lagi batas-batas itu, terutama dalam konteks politik, ekonomi dan sosial budaya.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat perubahan begitu cepat dan bahkan sulit diprediksi lagi. Inilah sebuah tantangan yang mesti dihadapi dengan cerdas oleh bangsa-bangsa yang ingin maju di arena persaingan dunia yang semakin ketat. Salah satu konsekuensi logisnya adalah perlu perubahan paradigma manajemen pendidikan yang lebih berorientasi kepada *net working* pendidikan. Dalam kajian perencanaan kontekstual, Peterson, dkk (1997: 17) melihat lembaga pendidikan sebagai “industry pengetahuan”. Dengan demikian, sudah saatnya sistem pendidikan nasional dirancang dan dibangun kearah paradig baru, pendidikan sebagai “industry pengetahuan dan teknologi” yang berasaskan pancasilah UUD 1945 sebagai nilai luhur dan cita-cita Indonesia merdeka.

Implikasi dari perubahan paradikma manajemen pendidikan tersebut diatas adalah perlunya pengembangan model dan criteria kerja lembaga pendidikan yang memajukan bangsa ke depan. Bila selama ini, lembaga pendidikan lebih dipandang sebagai organisasi formal (birokratik, komunitas, kolegal, entitas politik, atau anarki terorganisasi), maka ke depan ia harus berganti bentuk dan makna sebagai organisasi “knowledge network or industry” yang terdiri atas *linkages* yang tidak terbatas; atau suatu varian dari model anarki terorganisasi, yakni institusi pendidikan sebagai “conglomerate” (Clark, 1985), atau suatu *holding company* dari beragam usaha insitusi pendidikan yang berkait; atau model organisasi yang muncul kembali terakhir ini dalam dunia pendidikan, yaitu organisasi sebagai Kultur (Clark: 1963; Tierney, 1990; Peterson, dkk, 1995). Penekanan model ini pada redireksi peran, misi, dan keterhubungan eksternal institusi, redesain atau restrukturisasi proses akademik yang mempengaruhi pola dasar dari kerja akademik dalam pengajaran, pembelajaran dan penelitian.

Beberapa hasil pengamatan tentang kecenderungan yang terjadi dalam bidang pendidikan formal di Indonesia, terutama pada pendidikan tinggi dalam periode dan proses perubahan yang sedang berlangsung manunjukkan kuatnya watak industrialisasi global. Namun, para pengamat sosial dalam hal ini masi menunjukkan sikap kontversial. Di satu pihak, mereka menyaksikan nasib pendidikan di Indonesia dengan wajah muram, dan membahasnya dengan penuh ratapan, penyesalan, kalau bukan kemarahan. Mereka menganggap arus industrialisasi atau globalisasi sebagai sebuah ancaman atau musuh pendidikan. Dipihak lain, ada pula pengamat sosial yang dengan giat membuka berbagai wilayah baru dalam dunia pendidikan. Dengan bersemangat mereka menyebarkan berita seakan-

akan dunia pendidikan telah menikmati sebuah kebangkitan baru dan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan yang tak terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi, jaringan kerja antar lembaga pendidikan mancanegara, serta semakin meluasnya kesempatan belajar bagi kaum muda usia sekolah dari berbagai latar belakang sosial; dilihat sebagai kemajuan terpenting yang pantas dirayakan dan disyukuri dalam bidang pendidikan. Siapa di antara mereka yang benar? Menurut kami ke duanya ada benarnya dan ada salahnya. Tetapi, bukan soal salah-benar itu sendiri yang menjadi pokokbahasan di sini. Setiap perubahan sosial besar-besaran menguntungkan sebagian pihak lain. Hal yang sama terjadi dalam dunia pendidikan kita, bahkan masyarakat kita secara keseluruhan. Pihak yang dirugikan cenderung membesar-besarkan atau hanya mempersoalkan hal-hal di masa lampau yang indah dan akan segera lenyap. Mereka tidak rela dan cenderung bernostalgia ke masa lampau yang tidak mungkin kembali. Pihak yang diuntungkan oleh perubahan itu cenderung membesar-besarkan atau hanya mengamati hal-hal yang lebih baik yang dijanjikan oleh perubahan yang sedang berlangsung. Kadang-kadang karena asik, mereka tidak kritis terhadap proses yang masih baru terjadi dan belum sepenuhnya teruji, serta cenderung mengabaikan biaya sosial dan akibat-akibat tak resmi atau tak disengaja atau berjangka-panjang yang tidak segera tampak ke mata.

Namun, tanpa maksud mengedarkan masalah secara berlebihan yang dapat berakibat salah paham, kami coba mengaitkan perbedaan kedua sikap itu dengan dua cara memahami pendidikan yang sangat kontras. Kaum pesimis dan pemuram yang meratapi nasib pendidikan cenderung mengartikan pendidikan pada persoalan-persoalan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dedikasi, intelektualisme, etika dan tanggung jawab sosial, kejujuran, kreativitas, otonomi individu, kebenaran, mungkin juga kesejahteraan umat manusia secara universal. Semua itu jelas serba indah dan mulia. Tetapi, semua yang indah dan mulia itu tidak tiba-tiba hadir di muka bumi dan di luar proses sejarah sosial. Ia merupakan produk dari sebuah sejarah yang sering kali berlumuran darah, penuh dengan korupsi dan imoralitas. Berbagai candi termegah di dunia, seperti halnya berbagai peralatan teknologi komputer paling canggih di dunia, merupakan hasil sebuah proses panjang dan berbelit eksploitasi antar manusia. Para pendidik yang meratapi nasib pendidikan kita jarang sekali mampu dan mau menengok sejarah bobrok yang mengertai terbentuk dan pemuliaan berbagai nilai yang

luhur dan indah. Proses olah otak dan hati nurani dianggap berlangsung secara terpisah dari dunia yang bobrok. pendidikan dianggap bertugas mulia memperbaiki dunia yang terletak “di luar sana”, di luar tembok dan pagar sekolah atau kampus.

Sedangkan, optimis yang bersorak-sorai menyambut perubahan besar-besaran (industrialisasi) dalam dunia pendidikan mutakhir cenderung memahami persoalan pendidikan terutama sebagai persoalan angka-angka, hal-hal kebendaan, lembaga, proses interaksi indrawi, dan penerapan pengetahuan atau keterampilan dalam dunia kerja industry. Sekarang pendidikan menjadi jauh lebih tersebar dan terjangkau oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai pelosok dunia. Perbedaan kesempatan bersekolah antara jenis kelamin, atau antara desa dan kota sudah jauh lebih baik. Tidak salah jika ini dianggap sebagai sebuah proses pemerataan dan demokratisasi pendidikan. Proses belajar mengajar juga jauh lebih fleksibel, bahkan menarik berkat berbagai teknologi informasi. Belajar tidak lagi harus berarti bersusah payah, memencilkan diri, bertahan dalam kebosanan, atau mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, lamban dan rumit. Dengan komputer dan internet, pendidikan menjadi penuh warna dan pesona. Ternyata kemudahan, ketepatan, dan kecepatan proses olah informasi tidak sama dengan peningkatan kecerdasan, kreatifitas, apalagi kepekaan anak belajar terhadap masalah-masalah sosial. Komputer paling canggih sekalipun tak pernah mampu menjawab persoalan-persoalan etika sosial atau religius yang dapat dikerjakan sebuah sekolah tradisional yang paling bersahaja dalam hal fasilitas teknologi. Malahan berbagai lembaga pendidikan padat-teknologi tinggi telah menumbuhkan sebuah ketergantungan baru pada teknologi yang sangat mencemaskan. Ia juga menumbuhkan pengempitan sikap, minat, serta cakrawala pemahaman persoalan menjadi serba singkat cepat, dan instrumental. Semua itu masih harus dibayar secara tidak adil dan tidak merata dalam bentuk beban semakin rumitnya berbagai peraturan, perundang-undangan, serta birokrasi dan alienasi.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan belum konsisten dengan aksi politik. Kepentingan politik (partai politik) lebih dominan dari keberpihakannya kepada kepentingan kemajuan bangsa melalui usaha pendidikan yang maju dan berkualitas. Keberlanjutan kekuasaan (*power sustainability*) dan berbagai

kekuasaan (*power sharing*) lebih menjadi target praktisi politik di Indonesia. Semestinya, sistem politik di Indonesia mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa agar maju dan merdeka, menjadi tuan rumah sendiri dibawa panji-panji UUD 1945 dan nilai inti Pancasila dengan menjunjung tinggi usaha pendidikan yang modern dan berkualitas.

- 2) Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah semestinya menjadi “sin qua non” dan prioritas nomor satu dalam ranking seleksi proses dan produk kebijakan politik pemerintah dan Negara Indonesia. Karna, bukti sejarah dunia dan amanat pendiri bangsa sudah cukup jelas dan kuat untuk ditauladani dan diwujudkan dalam pembangunan bangsa di masa depan.
- 3) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan dan pendidikan politik untuk kemajuan bangsa harus diawali dengan penempatan orang (pejabat) yang tepat orang dan tepat tempat, baik di jajaran eksekutif maupun dewan legislative. Ingat kata nabi “suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. Implikasinya, ahlik politik dan ahli pendidikan adalah syarat mutlak untuk menduduki jabatan politik dan terutama jabatan pendidikan (Mendiknas, Aselon I dan II). Kemudian, takalah pentingnya, dukungan APBN dan APBD minimal 20% yang dikelola dalam satu atap untuk biaya pendidikan nasional.
- 4) Dalam konteks pasar bebas dan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, maka konsep dan model “*knowledge networking industry*” atau industrialisasi pendidikan mesti dikedepankan dalam perancangan sistem pendidikan nasional dengan tetap berasaskan pancasila dan UUD 1945 sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia yang maju diantara bangsa-bangsa beradab dan berbudaya di dunia modern sekarang dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. and Verba, Sydney, (1965), *The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations*; Boston and Toronto: Little, Brown and Company
- Depdiknas (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Depdiknas, (2003), *Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003*, Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.
- Frey, Fredrick W., (1960), *Political Science, Education, and Development*, Massachusetts Institute of Technology (Kumpulan Literatur Bahan Kuliah Aspek Poleksosbud dalam Pendidikan yang diasuh oleh Prof. Dr. Soedijarto, MA, PPs UNJ, 2004)
- Hanson, John W., dan Brembeck, Cole S., (1966), *Education and the Development of Nations*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- H. Soedijarto, (2004), *Terselenggaranya Satu Sistem Pendidikan Nasional dan Dimasukkannya Kebudayaan Nasional sebagai Amanat UUD 1945*, Makalah, disajikan dalam Seminar Komisi Konstitusi tentang Sistem Ekonomi dan Sistem Sosial dalam Perubahan UUD 1945, MPR-RI, Jakarta.
- Inglehart, Roland (1997), *Moderenization and Postmoderenization; Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*, New Jersey: Princeton University Press.
- Lipset, Seymour Martin, (1959), *Political Man; The Social Bases of Politics*, New York: Anchor Books Doubleday & Company, inc.
- Peterson, Marvin W., dkk, (1997), *Planing and Management for a Changing Environment, A Handbook on Redesigning Postsecondary Institutions*.
- Rostow, W.W. (1971), *Politics and the Stages of Growth*, New York; Cambridge at The University Press.
- The Encyclopedia Americana International Edition* (1998), Volume 22, Grolier Incorporated, International Headquarter, Connecticut, Danburyd.